



Haryadi Minta Jangan Muncul Prasangka

Kebijakan ini bagian dari perpanjangan moratorium. Jadi bukan ditiadakan. Tapi diperpanjang melalui Perwal 85. Hanya dikecualikan, bintang 4 dan 5 dibuka. Termasuk guest house agar mereka juga merasakan kue pariwisata.

YOGYA. TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, meminta masyarakat tidak tergesa-gesa berprasangka terhadap kebijakan baru Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

"Kebijakan ini bagian dari perpanjangan moratorium. Jadi bukan ditiadakan. Tapi diperpanjang melalui Perwal 85. Hanya dikecualikan, bintang 4 dan 5 dibuka. Termasuk guest house agar mereka juga merasakan kue pariwisata," bebernya, Jumat (4/1).

Ia menjelaskan, setelah penerbitan perwal tersebut, investor tidak bisa langsung membantiri kota untuk membangun hotel. Mereka juga harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yang akan dituangkan dalam petunjuk teknis lebih lanjut. "Nanti akan diatur dengan peraturan tersendiri. Jangan buru-buru men-judge. Nanti yang kayak apa hotel bintang 4 dan 5," ucapnya.

Tidak hanya membuka kembali izin pendirian hotel, tambahnya, tapi juga perlu penekanan terkait aspek budaya, sosial, lingkungan yang harus diterapkan pada hotel yang akan dibangun. "Banyak juga yang menyayangkan hotel di Yogya tidak ada nuansa Yogya. Apalagi bintang 4 dan 5, arsitek dan suasananya harus menyesuaikan dengan Yogya," ucapnya.

Selanjutnya, bila dilihat dari lalu lintas, Baiquni menyebut bila pembangunan hotel terkonsentrasi di kota, maka wilayah kota akan dilingkupi dengan masalah kemacetan di mana-mana.

"Daya dukungnya perlu diperhatikan, berapa hotel di kota. Lalu Pemprov (DIY) perlu mengalokasikan kebijakan secara spasial sehingga Kulon Progo yang akan ada NYIA butuh juga internasional hotel yang mengkomodasi kru penerbangan maupun wisatawan," tandasnya. **(kur)**

Haryadi Minta
 • Sambungan Hal 9

4 dan 5, luasan, jumlah kamar berapa," ucapnya.

Ia menjanjikan, petunjuk teknis tersebut akan segera diterbitkan. Haryadi mengatakan, paling lambat peraturan akan diumumkan pada pertengahan Februari 2019. "Termasuk mengatur soal desain hotel serta penggunaan airnya yang harus menggunakan PDAM," tandasnya.

"Haryadi berharap, kebijakan baru tersebut akan berkembang sesuai dengan kegiatan industri pariwisata sehingga mampu memenuhi kebutuhan, khususnya wisatawan yang pelesir ke Kota Yogyakarta.

"Nantinya masyarakat juga bisa menikmatinya. Terkait pengawasan dan operasionalnya, nanti juga akan dipegang PHRI. *Lower and selling pricing* berapa. Ini justru untuk melindungi industri pariwisata kita," bebernya.

Potensi daerah
 Sementara itu, peneliti Senior Pusat Studi Pariwisata UGM, Prof. M Baiquni mengatakan bahwa sudah saatnya investor menasar ke daerah baru sehingga lahan yang tersisa di Kota Yogyakarta tidak terkonsentrasi untuk hotel.

"Tidak hanya kebijakan kota, tapi provinsi juga harus memberi arahan kepada investor untuk mengalihkan investasinya, bisa ke Kulon Progo maupun Gunungkidul. Karena dilihat spasial geografisnya, mereka punya potensi itu," ujarnya.

Ia juga menuturkan, kebijakan Pemkot Yogyakarta untuk mencabut moratorium hotel, harus berdasarkan pada kajian kualitas hotel di kota sehingga tidak terjadi *over supply*, yang berakibat saling meniadakan. "Ini harus dikaji untuk dipakai landasan kebijakan," ujarnya.

Baiquni pun menganggap perlu adanya penelitian kembali terkait perizinan agar hotel di Kota Yogyakarta bisa memenuhi standar kualitas. "Jangan sampai Yogya dikenal hotelnya buruk. Jangan hanya memberi izin, tapi mengontrol apa izin sudah dilakukan dengan benar," ucapnya.

"Lanjut

1. Jitanggapi
 2. Dikeahui
 3.
 4.
 5. Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005